



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMRON ROSYADI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **432911**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/270 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 625 m2/625 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 572.562.302**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.462.562.302

III. HUTANG Rp. 50.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.412.562.302

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDULLAH SANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 747189

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/114 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 995 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, HONDA AFPI/SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.078.570.000

III. HUTANG Rp. 148.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 930.570.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN AMAN MULYADI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 733684

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	410.700.000
III. HUTANG	Rp.	89.714.050
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	320.985.950

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.